**BAB 11**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**1. Literatur Riview**

Di penelitian sebelumnya yang berjudul Kemiskinan Dan Pembangunan Manusia *(Poverty And Human Development)* yang di teliti atau di tulis oleh Bambang Pudjianto dan M.Syawie. dalam penelitian ini sangat menginspirasi peneliti.

Dalam penelitian sebelum nya penulis memaparkan untuk mengingat kapasitas dan kopentesi ini, manusia perlu meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Dan tujuan jurnal yang di tulis untuk mengingatkan bahwa ada kecendrungan pembangunan yang kualitas manusia berkorelasi dengan kondisi kemiskinan penduduk, artinya kualitas manusia akan mudah di capai apabila penduduknya sudah terlepas dari kemiskinan. Dilihat dari data, kemiskinan makin sulit di turunkan karena garis kemiskinan juga bergerak. Ketika pertumbuhan konsumsi masyarakat tidak bisa mengejar pertumbuhan angka kemiskinan,sudah pasti dia dia bisa melewati garis kemiskinan. Komitment untuk menigkatkan pembangunan manusia perlu di sertai dengan upaya menurunkan angka kemiskinan. Perlu terus di upayakan membantu dan memberdayakan masrakat miskin.

Berdasarkan dari perihal kemiskinan dan pembangunan manusia pada intinya pembangunan memang sangat perlu di tempatkan sebagi priotitas pembangunan meningat laporan UNDP (2014) menunjukkan peringtkat *human development index* Indonesia di posisi ke 108 dari 187 Negara.

Dengan demikian peneliti menegaskan boleh dikatakan pembangunan manusia pada pokoknya bertujuan meningkatkan kemampuan penduduk untuk menuju hidup yang produktif, dan menyenangkan. Misalnya umur panjang, kesehatan baik, terdidik, pendapatan cukup membeli makanan, pakaian dan tempat tinngal. Semakin tinggi nilai IPM ada kecendrungan semakin baik pula pembanagunan manusia dari aspek kesehtan, pendidikan dan ekonomi. ( Bambang & M.syawie, 2015,h,231-299)

Di penelitian selanjutnya berbeda berjudul Sutainable development Goals ( SGgs) dan pegetesan kemiskinan yang di tulis oleh Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. Penelitian ini lebih ke program SDGs dalm pengetas kemiskinan penangan persoalan kemiskinan harus di mengerti dan di pahami sebagai persoalan dunia, sehinnga di tangani dalam kontes global pula. Dalam SDGs dinyatakan *no poverty* ( tanpa kemiskina) sebgai poun pertama prioritas. Dalam hal ini berarti dunia dan fokus negara Indonesia bersepakat meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Kemiskina adalah persoalan kemanusiaan. Dari dimensi ini adanya kemisinan membawa konsekuensi adanya tanggung jawab moral bagi setiap orang untuk memberhatikan kehidupan orang yang hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan adalah juga merupakan pelanggaran terhadap Hak-hak Asasi Manusia “ ...*human rights become a constitutive element of development and human rights violations become both a cause and sympton of poverty*” ( Tammie O’Nei 2006,p-7). Hak- hak manusia tidak dapat dikurangi, apalgi dicabut dari persepektif ini masalah kemiskinan tidak cukup hanya dilihat dari angka-angka statistik saja. Besar kecilnya masalah kemiskinan tidak dapat hanya dilihat dari persoalan angka statistik didalam nya dapat persoalan manusia yang terancam hidupnya. Konsep SDGs itu sendiri lahir pada kegiatan Koferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang di laksanakan oleh PBB di Rio de Jainero tahun 2012. Pekerjaan Sosial mempunyai relevan yang sangat kuat dengan masalah kemiskina. Sudah berabad-abad profesi ini bergelut dan terlibat dalam penangan masalah kemiskinan.secara histori pekerjaan sosial boleh dikatakan lahir dari masalah kemiskinan. Profesi ini bahkan menempatkan masalah kemiskinan sebagai bidang utama yang ditangani pekerjaan sosial. Jika sangat menjungjung tinggi Hak-Hak Asasi Manusia, pekerjaan Sosial harus berbada di garis paling depan dalam upaya mengatatsi kemiskinan SDGs merupakan tujuan bersama yang diharpakan dalam pengetas kemiskinan.( Ishartono& SantosoTri Raahrjo,h,159)

Penelitian selajutnya yang berjudul Upaya Pemerintah JOKO WIDODO Dalam Mendorong implementasi *Sustainble development goals* di Indonesia (*president joko widodo’s effort in implementing Sustainble Development Goals In Indonesia*). Penelittian yang di teliti oleh Adde Marup Wirasenjaya, SIP., M,A dalam penelitian ini bertuliskan pembangunan merupakan hal yang penting bagi setiap negara. Namun dilain sisi pembangunan juga dapat membawa hal negatif jika pembangunan tidak memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan. Pembangunan yang berbasis ekonomi sering kali menciptakan kesenjangan-kesenjangan masyarakat. Pada tahun 2015 *PBB* melalui UNDP melahirkan agenda pembangunan yakni *Sustainble Development Goals (SDGs)* atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tentunya akan memiliki tantangan dan hambatan. Begitu pula dengan mengimplementasikan SDGs di Indonesia. Baik segi masalah rendahnya kesadaran dan pemahaman dalam pencapain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam masyarkat maupun pemerintah, dapat dilihat sampai pada saat ini penerpan SDGs mesih terkesan jalan di tempat. Hal ini di karenakan kurangnya sosialisasi dan pemerintah dalam penerpan SDGs dikalangan masyarkat. Faktor rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaksanaan SDGs di Indonesia, karena pada saat ini sosialisasi Indonesia masih dalam pendektan yang kurang partisipasi walaupun tujuan-tujuan dari SDGs sudah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan pada negara. Pada hambatn selanjutnya masalah geografis. Indonesia meupakan negara kepualuan yang terdiri dari 17.000 pulau dan letaknya berjauhan satu dengan yang lainnya. Ketimpang baik ekonomi dan pembangunan menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Karakteristik yang berbeda-beda satu daerah dengan daerah lainnya menjadi tantangan dalam implementasi SDGs di karenakan setiap daerah harus memiliki pendekatan berbeda-beda dalam mewujudkan poin-poin SDGs di daerahnya ditambah setiap daerah yang memiliki sumber daya dan kapasitas yang terbatas dalm mewujudkan SDGs. Dengan keterbatasan san karakteristik berbeda di setiap daerah jadi dengan semua tantangan seharusnya tidak perlu dianggap sebagai beban melainkan tantangan yang ada harus dihadapi untuk meningkatkan kinerja bagi akselerasi pembangunan nasional hingga 2030 oleh karena itu pelaksanaan SDGs di Indonesia membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah saja yang berperan aktif melainkan masyarkat juga harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan pihak swsta dan LSM. Keterlibatan unsur-unsur sipil dapat memecahkan permaslah yang selama ini dihadapi oleh Indonesia terutama pembangunan. Keterlibatan peran daerah-daerah, organisasi sipil termasuk perguruan tinggi atau Universitas membawa keyakinan SDGs akan membantu pembangunan berkelanjutan di Indonesia. ( Adde marup wirasenjaya, 2014)

Disini peneliti **mencoba melakukan perbandingan** di antara tiga jurnal yang telah di papar kan di atas jurnal yang pertama yang di tulis oleh peneliti atas nama Bambang Pudjianto dan M, Syawie. Penelitiam yang berjudul Kemiskinan dan Pembangungan manusia ( *Poverty And Human Development* ) peneliti yang pertama.

**Persamaannya** dengan penelitian yang sedang saya teliti yakni menyatakan bahwa untuk mengingat potensi dan kapasitas. Manusia perlu meningkatkan pendidikan dan kesehatan, jadi intinya suatu negara yang di katakan pembangunan nya berhasil yakni dilihat dari potensi IPM (Index Pembangunan Manusia) yakni manusia yang berkualitas dan terbebas dari kemiskinan.

**Perbedaanya** dengan penelitian saya adalah disini hanya tidak ada ikatan atau kerja sama seperti judul penelitian saya yakni kerja sama indoneisa dan UNDP dan saya tidak hanya melihat dari segi Index pembangunan manusianya saja (IPM), lebih melihat lebih luas karena menurut ahli ekonomi kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensi yang artinya bisa di ukur atau dari bebagai dimensi.

Dari Jurnal riview selanjtnya lebih ke penerapan SDGs fokus pada poin peratama yakni (*No Poverty)* tanpa kemiskinan dalam hal ini dunia dan termasuk negara Indonesia setuju menghapus kemiskinan. Dan dinyatakan kemiskinan juga termasuk pelangaran HAM ha-hak asasi manusia karena disni yang terancam adalah manusia.

**Persamaannya** dengan penelitian saya yakni saya juga ada nya penerepan SDGs disni yang dimana pembangan berkelanutan yang menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bekesinmabungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat sosial, dan pembangunan yang menjaga kualitas hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

**Perbedaanya** dari penelitian saya ialah disini di tegaskan adanya implementasi dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs) semntara di penelitian saya yakni bagaimana penerapan SDGs ini dalam menurun kan angka kemiskinan di Indonesia.

Jurnal selanjutnya Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. yang di tulis oleh yakni masih berkaitan dengan pembangunan, pembangunan yang merupakan hal penting bagi setiap negara dsini salah satu nya negara Indonesia. Yang telah menerapkan SDGs namun tidak kecil kemungkinan dengan luasnya negara Indonesia pastinya ada saja hambatan seperti mengingat Geografis Indoneisa yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau dan letaknya berjauhan satu dengan yang lainnya namun ini tidk menjadi kendala bagi indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan.

**Perbedaannya** di penelitian ini di tegas kan pentingnya ada SDGs untuk salah satu memberantas kemiskinan baik dunia maupun negara berkembang dan penting nya atas kepemahaman masyarkat tentan adanya SDGs ini mengingat luas nya negara Indonesia tidak setidikit masyarkat yang belum mengerti atau belum paham apa itu SDGs.

**Persamaanya** dengan penelitian saya yaitu menegaskan kan dengan adanya pembangunan berkelanjutan dan nasional (SDGs) ini di harapkan mampu mengurangi angka kemiskinan di indonesia dan mampu memperkuat bahwa masyarakat juga harus membantu bersama-sama memberantas kemiskinan melalu penyuluhan dari pemerintah pusat maupun daerah.

**2. Kerangka Teoritik / Konseptual**

Dalam penyusunan penelitian ini akan digunanakan kerangka pemikiran yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Kerangka ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahn dengan di topong oleh teori-trori dari para pakar ahli Hubungan Internasional yang bekompeten dalam penelitian ini.

Kerangka pemikiran mengemukakan dasar pemikiran serta dasar-dasar teori yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari teori-teori dan asumsi para pakar. Fungsi dari kerangka pemikiran adalah untuk menetukan variabel-variabel mana saja yang terlibat dalam penelitian ini, serta dimana masing-masing variabel dalam kerangka tersebut. Dalam bentuk kerangka akan terlihat jelas variabel bebas maupun terikat, agar lebih mudah menentukan suatu variabel terikat maupun bebas, maka digunakn teori-teri yang sudah ada.

Untuk dapat memahami hal tersebut, penelitian menerangkan dengan menyertakan beberapa gambaran mengenai **kerjasama.** Pengertian kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena manusia adalaha mahluk sosial yang saling membutuhkan.

**2.1. Kerjasama Menurut Paraahli**

Menurut Charles H. Cooley kerjasama akan timbul jika sesorang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dan sekaligus memiliki pengetahuan yang cukup serta kesadaran atas dirisendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut

**2.2. Kerjasama internasional**

kerjasama internasional adalah serangkaiian perwujudan dan hubungan antar bangsa yang berpijak pada kepentingan nasional. Kepentingan nasional berkaitan dengan tujuan nasional dalam kurun waktu tertentu yang berisi sasaran-sasaran nyata yang harus diwujudkan.

Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan Nasional dapat menjmin kelangsungan hidup seluruh elemen bangsa. Pernyataan inilah, sejalan dengan asas hubungan internasional yang dilaksanakan oleh tokoh politik dan bangsa Indonesia.

**2.3. Pengertian Kerjasama Internasional**

Kerjasama Internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya yang bertujuan untuk memenuhui kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan Nrgara-negara di dunia. Kerja sama Internasional, yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Berdasarkan jumlah negara yang mengikuti kerjasama, dapat di bedakan menjadi tiga macam bentuk kerja sama, yaitu:

**Kerja sama bilateral**

Kerja sama Bilateral adalah kerja sama anatar dua negara karena saling mendapatkan keuntungan atau memiliki hubungan yang baik. Contohnya dalam perdagangan, Indonesia beberapa kali bermitra dengan negara lain seperti Jepang dan Singapura. Contoh lainya adalah terkait ibadah haji yang mana Indonesia bekerja sama dengan Arab saudi

**Kerja sama Regional**

Kerja sama Regional adalah kerja sama yang merupakan antar beberapa negara dalam kawasan atau wilayah. Kerja sama ini terjadi karena adanya suatu kepentingan bersama di bidang poltiki ekonomi dan pertahanan. Contoh nya untuk kawasan Asean dan timur tengan ada Liga Arab.

**Contoh kerja sama regional**

1. Kerja sama Regional di bidang sosial dan budaya, contohnya ASEAN.
2. Kerja sama Regional di bidang pendidikan, contohnya Organisasi menteri pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO) didirikan di tahun 1974 yang anggotanya terdiri dari Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
3. Kerja sama Regional di bidang ekonomi, contohnya MEE ( Masyarkat Ekonomi Eropa ) yang merupakan organisasi khusus untuk negara di Eropa Barat. Didirikan pada tanggal 1 Januari 1958 dengan Tujuan melakukan perdagangan bebas antar negara eropa barat, selain di eropa ada juga di Asia Tenggara dengan nama AFTA dengan tujuan meningkatkan daya saing ekonomi Nagara-Negara ASEAN.

**Kerja sama multilateral**

Kerja sama multilateral adalah kerja sama yang dilakukan lebih dari 2 Negara tanpa batas kawasan atau wilayah. Biasanya kerja sama antar suatu kawasan atau bisa beda kawasan. Angggota terdiri dari dua jenis yaitu anggota utama dan anggota aktif. Maksud dari anggota utama adalah negara dengan kekuatan menengah misalnya kanada sedangkan anggota aktif adalah negara kecil yang perannya terbatas atau sedikit kekuatan dalam urusan Internasional, biasanya anggota aktif secara sukarela dari anggota. Contoh kerja sama Multi laterla adalah adanya perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), WTO dan Organisasi konferendi islam (OKI).

**2.4. Pengertian Kerjasama Internasional Menurut Paraahli**

**Dougherty dan Pflatzgraff (1997)** pengertian kerjasama internasional adalahan hubungan antar negara berbeda yang tidak ada unsur kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum internasional dalam upaya memberikan kebebasan dalam membangun negaranya sendiri.

**Holsti (1987)** definisi kerjasama internasional adalah kolaborasi yang dilakukan setiap negara dalam melihat masalah nasional ( negaranya ) yang dianggap perlu adanya penangganan baik, lantaran jika tidak dilakukan akan mengancam kesatuan dan persatuan.

**Perwita Dan Yani (2005)** arti kerjasama internasional adalah sisterm hubungan dengan berdasarkan pada kehidupan internasional yang terbagi dalam berbagai bidang seperti indiology, ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan hidup, kesehatan, pertahanan, dan keamanan.

**2.5. Manfaat Kerja sama Internasional terhadap Indonesia**

**1. Terjalin Persahabatn Antar bangsa**

Setiap negara pasti menggunakan pedoman politik luar negerinya msing-masing untuk melakukan kerja samaInternasional. Sama halnya dengan Indonesia, Indonesia sudah lam menajalin persahabatan antar negara di saat suasana yang masih damai ini.

Contohnya kedatangan pangeran Arab saudi ke Indonesia, selain juga terjallin perbatasna Indonesia juga mendapat bantuan dana sehingga bisa untuk melaksanakan pembangunan nasional khususnya pembangunan ekonomi.

**2. Menacakup kebutuhan bangsa Indonesia**

Indonesia termasuk negara dengan komsumsi terbesar di dunia. Sangat sulit bagi Indonesia hanya mengandalkan produksi dari dalam negeri karena begitu padatnya jumlah warga negaranya. Sehingga dengan ikut dalam kerja sama Indonesia, Indonesia bisa mencakup kebituhan untuk warga negaranya.

**3. Ikut Berperan dalam kancah perekonomian dunia**

Dengan berpartisipasi Indonesia di kancah Internasional maka Indonesia mendapatkan peluang untuk berperan lebih nyata lagi dalam perekonomian dunia. Contohnya Indonesia beberapa kali dipilih untuk tempat pertemuan antar negara ASEAN, dan sebgaiannya.

**4. Memperoleh pengalamn dari Negara-Negara lain**

Indonesia tidak hanya mewujudkan cita-citanya tanpa mendapatkan inspirasi dan pengalamn dari negara yang sudah maju. Agar memperoleh pengalaman bagaimana mengembangkan sistem informasi pemasran yang efektif untuk mengembangkan kegiatan pasar dunia dan juga cara untuk mendapatkan panduan untuk bagaimana mengembangkan sistem informasi pemasaran yang efektif untuk mengembangkan kegiatan pasar dunia dan juga cara untuk mendapatkan keluwasean dalam mengahadapi pasar global.

**5. Memantau perkembangan perekonomian dunia**

Dengan menjadi Anggota Organisasi kerja sama Internasional Indonesia bisa mendapatkan Informasi untuk memantau kondisi perkembangan perekonomian di dunia. Dengan mengetahui hal tersebut, Indonesia bisa mebuat kebijakan- kebijakan baru terkait dengan perekonomian dalam negeri. Misalnya harga BBM tiap bulan naik turunnya di tetapkan berdasarkan harga minyak di pasaran Internasional.

**2.6. UNDP-Indonesia untuk SDGs**

Karena dalam penelitian ini saya meneliti **Kerjasama Indonesia dan UNDP dala Pneurunan angka kemiskinan di Indonesia.** Yang dimana melalui pembangununan berkelanjutan sesuai dengan poin pertama *Sustainbale Development Goals* SDGs point (1). *No poverty,* tanpa kemiskinan disini peneliti mencoba menerapkan SDGs dalam kerja sama Indonsia dan UNDP dalam penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Pada bulan September 2015, dewan Eksekitif UNDP menyetujui *Country Programe* baru untuk Indonesia untuk 2016-2020. Di bawah program yang baru ini dan sejalan dengan prioritas Pemerintah, UNDP mendukung Indonesia untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan dan mencapai SDGs. UNDP dan berbagai mitranya bekerja sama untuk memaksimalkan sinergi antara SDGs dan strategi pembangunan Nasional khususnya NAWACITA dan RPJMN.

**1. Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan**

Mengurangi kemiskinan dn kesenjangan akan tetap menjadi bidang utama kegiatan UNDP. Di tingkat kebijakan, penelitian dan analisis akan dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu kunci dan merumuskan rekomendasi, dengan mempertimbangkan konteks nasional dan lokal serta pengalaman Internasional terkini. Dengan kegiatan kebijakan UNDP akan mendapatkan masukan dari proyek-proyek di tingkat akar yang berfokus pada perempuan miskin dan hampir miskin- terutam yang berada di daerah pedesaan- dan orang-orang miskin yang bergantung pada hutan yang hidup dengan kurang dari USD2 perhari. Sekitar 17 juta petani swadaya akan diprioritaskan. UNDP akan memprioritaskan provinsi-provinsi yang tertinggal dalam pembangunan manusia, terutama Nusa Tenggara Timur dan Papua. Di Papua dan Papua Barat dengan pembangunan ekonomi lokal melalui program pengembangan keterampilan yang membantu memulai dan mengihidupkan kembali usaha lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk asli, mayoritas perempuan miskin.

**2. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim**

Menyadari bahwa Indonesia perlu mengadopsi perlu jalur pembangunan berkelanjutan, UNDP mendukung transisi ke model ekonomi hijau yang memperhitungkan perospek pembangunan jangka panjang serta dampak perubahan iklim. UNDP mendukung pengelolaan sumber dampak perubahan iklim. UNDP mendukung pengelolaan sumber daya alam untuk melindungi hutan tropis yang luas, laut yang kaya dan ke anekaragaman hayati yang unik di Indonesia. Sebuah program utama pengurangan Emisi dari Deforestasi dan degradasi Hutan (REED +) yang dibiayai oleh Norwegia. UNDP juga menudukung, straregi dan rencana aksi keanekaragaman hayati Indonesia (2015-2020). Di sektor energi, UNDP memberikan saran kebijakan dan melaknsanakan proyek percontohan untuk akses ke energi, peningkatan efisiensi energi dan pengembangan energi terbaru untuk membantu indonesia mencapai kontribusi energi sebesar 23 persen pada tahun 2025. UNDP mendukung perumusan standard efisinsi energi nasional dan peraturan untuk peralatan rumah tangga dan pengadopsian peraturan untuk mempercepat investasi sumber-sumber energi terbarukan. UNDP juga bertujuan untuk mendukung penerapan nasional dari indonesia Green Economy Model (I-GEM), sebuah model yang bertujuan untuk memberi masukan perencanaan kebijakan untuk transisi jangka panjang dari ekonomi coklat ke pembangunan rendah karbon.

**3. Konsolidasi demokrasi dan akses terhadap keadilan**

Tata kelola pemerintah adalah inti mandat UNDP dan tetap menjadi bidang penting bagi pembangunan indonesia. Untuk penguatan demokrasi, Indeks Demokrasi Indonesia yang telah didukung UNDP bekerjasama dengan pemerintah Australia akan digunakan untuk meningkatkan kebebasan sipil, hak politik dan lembaga-lembaga demokerasi

UNDP bekerja dengan pemerintah untuk menggunakan aturan hukum dan Akses terhadap keadilan dan melindungin hak-hak kelompok rentan. Sampai tahun 2019, dengan kementrian antra UNDP, Uni Eropa, dan Mahkamah Agung, dukungan disediakan untuk membangun kapasitas hakim, meningkatkan transparansi dalam fungsi pengadilan, dan meningkatkan kualitas layanan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. UNDP juga mendukung perbaikan sistem peradilan adat di Aceh, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah, untuk membuat lebih sesuai dengan setandar hak asasi manusia internasional dan perundang-undangan nasional. Sistem peradilan adat seringkali merupakan satu-satunya platfrom yang tersedia bagi masyarakat terpinggir, terutama daerah terpencil, untuk menyelesaikan perselisihan mendapatkan keadilan.

1. **Mendukung Keterlibatan Indonesia dalam isu-isu global dan Kerjasama Selatan-selatan**

Sebagai negara ekonomi baru dan penyedia kerja sama pembangunan, Indonesia memainkan peran penting dalam pembangunan global. UNDP bekerja dengan pemerintah untuk mendukung keterlibatan internasional Indonesia, khususnya untuk agenda 2030, Kementrian Global untuk Kerjasama Pembangunan yang Efektif dan G20. Bersama dengan Norwegia, UNDP mendukung Pemerintahan Indonesia untuk meningkatkan efektifitas Kerjasama Selatan-Selatan melalui penyediaan rekomdasi kebijakan dan berbagi pengalaman dari negara-negara maju dan berkembang. UNDP mendukung perumusan arah strategis Kerjasama Selatan-Selatan, penguatan kerangka pengaturan dan pembangunan kelembagaan. Bersama Indonesia dan negara-negara mitra, UNDP terlibat dalam kerjasama trilateral yang menggabungkan pengalaman dan pengetahuan indonesia.

**2.7. Teori Dan Konsep Kemiskinan**

**1. Pengertian Kemiskinan**

Secara harfiah menurut Poerwadraminta (1976), kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya “ tidak berharta- benda”. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dapat dikonotasikan sebgai suatu kondisi ketidak mampuan baik secara individu, kelompok, maupun keluarga sehinnga kondisi rentan terhadapa timbulnya permaslahan sosial lainnya.

Menurut Kuncoro pengertian kemiskinan (1997) kemiskinan di defenisikan sebgai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Adapun Kartasasmita (1997) mengatakan kemiskinan merupakan maslah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakngan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan Friedman (1992) bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidak samaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial.

**2. Beda Makna Fakir Dan Miskin**

Negara Indonesia mempunya tanggung jawab terhadap kemiskinan karna hal ini merupakan amanah konstitusi sebagai mana tercantum dalam **Undang-Undang Dasar Tahun 1946 Pasal 34 ( 1 )** yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Ketentuan ini lebih di perjelas lagi dalam **Undang-Undang N0.13 Tahun 2011** tentang penanganan Fakir Miskin dimana negara mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan fakir miskin dan keluarganya.

Fakir dan Miskin merupakan dua kata yang berbeda makna menurut buku-buku ilmiah dalam bahasa Arab. Al-Sa’dly (2002) mengutip surat At-Taubah menjelaskan bahwa Fakir dan Miskin merupakan kata yang berdiri sendiri. (Menangani kemiskinan, Dr, Bambang Rusranto,M.Hum.)

**2.8. Kemiskinan menurut Bapppenas**

Menurt Bappenas yang dimaksud kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekolompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasar nya untuk memperthankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Sedangkan menurut PBB kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasrnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa di hormati seperti orang lain. (Bappenas,2004)

**Definisi World Bank** kemiskinan ia lah sebagai ketidak mampuan mencapai standar hidup minimum ( World Bank, 1990).

**Menurut *World Bank***(2004) dalam Whisnu adi Saputra (2011), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset ( *lack of income and asset*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan penidikan yang dapat di terima (*acceptable*). Selain itu kemiskinan berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang di kategorikan miskin ( *the poor* ) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran , serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatsi maslah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-maslah pengguran, penidikan kesehatan dan msalah-maslah lainnya yang secara eksplisit berkaitan erat dengan maslah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatan lintas sekotir, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi. (Bappenass).

**United Nations Development program (UNDP)** mendefinisikan Kemiskinan sebagai ketidak mampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan masukkan penilaian “tidak adannya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik” sebagai salah satu Indikator kemiskinan (cahya 2004).

**2.9. Indikator Kemiskinan**

Masalah kemiskinan bisa ditinjau dari lima sudut. Yaitu persentase penduduk miskin, pendidikan (Khususnya angka buta huruf), kesehatan (antara lain angka kematian bayi dan anak balita kurang gizi), ketenagakerjaan, dan ekonomi (konsumsi/kapital). Indikator- indikator utama kemiskinan menurut BPS, antara lain sebagau berikut

1. Ketidak mampuan memenuhi kebutuhan komunis dasar (sandang, pangan, dan papan)
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatam, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun kelompok.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
6. Kurangnya apresiasi akses dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesimbungan
8. Ketidak mampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidak mampuan dan ketergantungan sosial (amak-anak terlantar, wantia korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Sedangkan menurut UNDP indikator kemiskinan harus diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama *(three key deprivation)* antara lain sebagai berikut :

1. Kehidupan (lebih dari 30 persen di negara-negara kurang berkembang tidak mungkin hidup lebih dari umur 40 tahun)
2. Pendidikan dasar ( seperti diukur oleh presentase penduduk dewasa yang buta huruf, dengan penekanan pada hilangnya hak pendidikan perempuan)
3. Keseluruhan ketetapan ekonomi (diukur oleh presentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan air bersih ditambah presentase anak-anak dibawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan).

Ukuran kemiskinan menurut Nukse dalam Jundi (2014) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hal pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menetukan kebutuhan dassar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menetukan tingkat pendapatan manuisa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

1. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

**3.** Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yang pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

**2.10. Garis Kemiskinan**

Garis kemiskinan merupak sebuah ukuran kemiskinan yang menyatak besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan, dan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seorang dikatakan miskin bila di pandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini di sebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Di Indonesia, garis kemiskinan yang biasa nya di pakai untuk mencerminkan tingkat penduduk miskin adalah garis kemiskinan yang di tetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Garis Kemiskinan merupaka penjulukan dari garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran Perkapita per bulan di bawah Garis Kemmiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum yang di sertakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, DLL).

Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatam. Paket kebutuhan dasar Non makanan di wakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditas di pedesaan. Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan standar Kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Pneduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan nasional (BPS).

**2.11. Pembangunan**

Di indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan material maka pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Kemudian atas nama pembangunan, pemerintah juga sering membangun keritik yang muncul dari masyarakat keritik tersebut dapat dinilai mengganggu stabilitas politik adalah sarana penting untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan.

**1. Mengukur pembangunan**

A. Kekayaan Rata-rata

Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup dengan demikian yang di ukur adalah produktifitas masyarakat atau produktifitas negara tersebut setiap tahunnya. Produktifitas ini di ukur oleh produk Nasional Bruto (PNB atau *Gross National Product, GNP*). Dengan demikian pembangunan ini diartikan sebagai jumlah kekayaan keseluruhan sebuah bangsa atau Negara

B. Pemerataan

Kemiskinan yang tertutup oleh adanya kekayaan yang luar biasa tersebut. Pemerataan ini secara sederhana diukur dengan melihat beberapa perosen dari PNB diraih oleh 40% penduduk miskin, berapa prosnt oleh 40% penduduk golongan menengah dan berapa prosnt oleh 20% penduduk terkaya. Dalam ilmu ekonomi bila 40% penduduk termiskin menerima kurang dari 12% ketimpangan yang dianggap mencolok. Kalau 40% penduduk termiskin menerima antra 12% sampai 17%, ketimpangan dianggap sedang. Bila penerimanaan golongan ini lebih dari 17% dianggap lumayan kecil dengan demikian dapat dikatakan, bangsa atau negara yang berhasil melakukan pembangunan adalah mereka yang disamping tinggi produktifitasnya, penduduknya juga makmur dan sejahtera secara relatif merata.

1. Kualitas kehidupan

Salah satu cara lain untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara dengan menggunakan tolak ukur PQLI ( *Physical Quality Of Life Index* ). Tolak ukur PQRI di perkenalkan oleh marios yang mengukur tiga indikator, yakni (1) rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun (2) rata-rata jumlah kematian bayi, (3) rata-rata prosentasi dan melek huruf .

1. Kerusakan lingkungan

Kerusakan lingkungan sebuah negara yang tinggi produktifitasnya, dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam sebuah peroses untuk menjadi semakin miskin hal ini misalnya karna pembangunan yang menghasilkan produktifitas yang tinggi itu tidak memperdulikan dampak pada lingkungannya. Sumber-sumber alam dan manusia itu adalah faktor utama yang menghasilkan pertumbuhan yang tinggi

1. Keadilan sosial dan kesinambungan

Dua faktor yakni faktor keadilan sosial dan faktor lingkungan kelestarian juga. Bila terjadi kesenjangan yang terlalu mencolok antra orang kaya dan orang miskin, masyarakat yang bersangkutan menjadi rawan secara politis. Akan terjadi gejolak politik yang bisa menghancurkan hasil pembangunan yang sudah ada, tidak hanya terbatas pada masalah pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga meliputi masalah sosial dan lingkunang

**2.12. Pembangunan: Faktor Manusianya**

Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus di tujukan pada pembangunan manusia. Manusia yang di bangun adalah manusia yang kreatif. Untuk bisa kreatif, manusia tersebut harus merasa bahagia, aman dan bebas dari rasa takut. Hanya manusia seperti inilah yang bisa menyelenggarakan pembangunan dan memecahkan masalah yang di jumpai nya. **Menurut Cabang Ilmu Ekonomi.**

**W.W. Rostow: Lima Tahap Pembangunan**

**1.** Masyarkat Tradisional.

Pada ilmu ini masyrakat masi di kuasai oleh kepercayaan-kepercayaan tentang kekuatan di luar kekuasan manusia. Manusia dengan demikian tunduk kepada alam, belum bisa menguasa alam

**2.**  Prakondisi untuk lepas landas

Masyarakat Tradisional, meskipun sangat lambat, terus bergerak. Pada suatu titik, dia mencapai posisi pra kondisi untuklepas landas.

**“ Ide-ide yang berkembang ini bukan sekedar pendapat yang menyatakan bahwa kemajuan ekonomi dapat di capai, tetapi bahwa kemajuan ekonomi merupakan suatu kondisi yang di perlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang di anggap baik: kebebasan bangsa, ke untungan pribadi, kemakmuran umum, atau kehidupan yang lebih baik bagi anak-ank mereka nantinya”**

**3.** Lepas Landas

Priodi ini di tandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonom. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang berjalan wajar, tanpa adanya hambatan yang berarti seperti ketika pada priode prakondisi untuk lepas landas.

**4.** Bergerak Ke Kedewasaan

Setelah lepas landas, akan terjadi proses kemajuan yang terus bergerak kedepan meskipun kadang terjadi pasang surut. Antara 10%- 20% dari pendapatan Nasional selalu di Investasikan kembali supaya bisa mengatasi persoalan pertambahan penduduk.

**5.** Jaman Konsumsi Masal Yang Tinggi

Karena kenaikan pendapatan masyarakat, konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup, tetapi meningkatkan kebutuhan yang lebih tinggi. Prtoduksi industri juga berubah, dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan barang konsumsi.

**Teori Rostow tentang lima tahap pertumbuhan ekonomi ini, seperti halnya teori-teori modernisasi lainnya, di dasrkan pada dikotonomi masyarakat tradisional dan masyrakat modern. (** Dr, Arief Budiman, Teori Pembangunan dunia ke tiga, 2000)

**3. Preposisi / Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban yang bersifat sementara atau dugaan mengenai dua variabel atau lebih. Berdasarkan permasalahn dan kerangka teoritis yang telah di kemukakan di atas. Maka peneliti mencoba menyimpulkan Hipotesis sebagai berikut:

**“ Dengan adanya Kerjasama Indonsia dan UNDP dalam melalui penerapan SDGs Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan Indonesia sekarang negara berpenghasilan menengah, tingkat pengangguran berhasil di turunkan dampaknya mengurangi angka kemiskinan.**

**4. Operasi Variabel Dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi  (Analisis) |
| Variabel bebas: Kerjasama Indonesia dan UNDP dalam penurunan angka kemiskinan. Ada nya MOU penandatanganan dalam pencapaian SDGs | 1. Asosiasi BANK pembangunan Daerah (Asbanda) dan UNDP menjalin kerja indonesia. Kerjasma yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU). 3 September 2016.  2. Dengan adanya perogram pembangunan PBB UNDP bertanggung jawab atas pembangunan berkelanjutan (SDGs) sesuai dengan poin pertama (No poverty) tanpa kemiskinan | **1.** penandatanganan MoU antara asbanda dan UNDP. Indonesia.  <http://indonesia.tempo.co./read/87931/2016/09/03/tarsihekaputra.1/penandatanganan-mou-antara-asbanda-dan-undp> .  2.SDGs in Indonesia:2018 and byond  Htpp://www.id.undp.org/content/indonesia/home/presscenter/articles/2018/sdgs-in-indonesia—2018-and-beyond.html |
| Variabel Terikat : Dengan adanya penerapan SDGs dalam kerjasama Indonesia dan UNDP telah mampu menurun kan tingkat pengangguran yang berdampak mengurangi kemiskinan, | 3.Indonesia telah mengalami kemajuan Indonesia sekarang negara berpenghasilan menengah ekonomi indonesia sekarang adalah 16 terbesar di dunia pembangunan manusia di indonesia telah meningkat (IPM) meningkat dari 0,474 di tahun 1980 menjadi 0,684 pada tahun 2014  4.dalam SDGs di nyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) pada point pertama yang menjadi prioritas dalam hal ini dunia bersepakat meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia dan termasuk indonesia | 3.UNDP indonesia kemitraan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan Development goals  http://www.id.undp.org/conetent/dam/indonesia/2016/press-doc  4. Sustainable Development Goals (SDGs) dan pengetasan kemiskinan Ishartono santoso& Tri Raharjo  http://fisip.unpad.ac.id/jurnal/index/share/article/view/220 |

**5.Skema Dan Alur Penelitian**

**Berkurangnya jumlah pengangguran yang berdampak menurunkan angka kemiskinan**

**SDGs Nomor.1**

**UUD Tahun 1945 Pasal 34 (1) Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara**

**Penanda tanganan *Memorandum Of Understanding (MOU) United Nation Development Programe (UNDP)* menjalin kerjasama dalam rangka pencapain *Sustainable Development Programe Gols (SDGs)* Aalisan pembangunan berkelanjutan di Indonesia**

**UNDP**

**KERJASAMA**

**INDONESIA**